



# LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (L K I P)TAHUN 2021



## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTT

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111,Telepon / fax : ( 0380 ) 8430046,  
Email:kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Web Site:www.bkd.nttprov.go.id

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 merupakan pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini juga dapat digunakan sebagai alat kendali untuk menilai kinerja pimpinan secara kuantitatif serta mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing- masing instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata Revisi atas LKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun LKIP sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2018- 2023 , Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sasaran strategis terdiri dari 5 sasaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan pokok dari keempat bidang dan Sekretariat.

Dari hasil perhitungan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 terhadap pencapaian target indicator kinerja RPJMD 2018-2023 maka diperoleh persentase capaian RPJMD yang diperoleh rata-rata sebesar **97.20 %**, sedangkan untuk capaian RENSTRA diperoleh rata-rata **107.81 %** dan keduanya masuk katagori **SANGAT BERHASIL** jika dibandingkan dengan capaian RPJMD 2020 sebesar **96.00 %** dan capaian RENSTRA 2020 sebesar **99.09 %** . Sedangkan dalam penyerapan anggaran baik itu untuk Program Penunjang Urusan dan Program Kepegawaian capaian di tahun 2021 sebesar **96,89 %** dari Total DPPA sebesar **Rp. 19.139.090.690,-**. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2020 sebesar **91.43 %** dengan total anggaran dalam DPPA sebesar **Rp. 16.837. 866. 290,-** Meskipun demikian secara

fisik pelaksanaan Program dan Kegiatan telah dilaksanakan 100% sesuai dengan prioritas kegiatan secara tupoksi maupun yang direncanakan dalam DPPA tahun 2021.

Setiap pelaksanaan kegiatan dan implemementasi kebijakan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi kendala adanya perubahan aturan sehingga mewajibkan adanya penyesuaian di tingkat Provinsi baik dari segi pemahaman akan berbagai regulasi dan tuntutan kebutuhan, Kualitas SDM , Sarana dan Prasana serta anggaran yang memadai untuk mendukung kinerja BKD Provinsi NTT dalam mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, kondisi ini tentu juga berpengaruh terhadap mitra kerja Pemerintah Provinsi NTT dengan pemerintah Kab/ Kota sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang tentunya sangat berdampak pada berbagai aspek dan kepentingan. Berbagai koordinasi dan kerja sama perlu ditingkatkan lagi agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kinerja BKD Provinsi NTT.

Adapun sistem penulisan LKIP sebagai berikut: Bab. I. Pendahuluan, Bab II. Perencanaan Kinerja, Bab III. Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari (A) Capaian Kinerja Organisasi, (B). Realisasi Anggaran dan Bab IV. Penutup. Di sertakan juga lampiran pendukung berupa (1). Perjanjian Kinerja dan (2) Lain-lain yang dianggap perlu.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021. Hal ini merupakan tahun ketiga penyusunan sejak ditetapkannya RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2018- 2023, yang menjabarkan target dan realisasi pencapaian RPJMD dan RESNTRA.

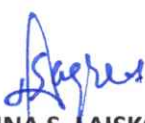
Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dan disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata Revisi atas LKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Isi dari LKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah merupakan media pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu mewujudkan *Pemerintahan bersih* dan *Pemerintahan baik*. Meski demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik maupun dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kupang, 28 Januari 2022

 **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,** 

  
**HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M. SI**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 197107071997032008**

## DAFTAR ISI

### IKHTISAR EKSEKUTIF

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai .....	5
1.5. Dasar Hukum Penyusunan LKIP.....	6
1.6. Sistematika Penulisan .....	7

#### BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Strategis 2018-2023 .....	9
2.2. Rencana Strategis Tahun 2021 .....	11
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	18

#### BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran .....	21
3.2. Akuntabilitas Keuangan .....	47
3.3. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan APBD tahun 2021 .....	48

#### BAB IV PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja .....	50
4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran serta Langkah Antisipatif ...	52
4.3 Strategi Pemecahan Masalah .....	53

#### LAMPIRAN – LAMPIRAN:

1. Lembaran verifikasi Level I LKIP 2021	
2. Perjanjian Perubahan Kinerja 2021	
3. Rencana Kinerja 2021	
4. Rencana Aksi 2021	
5. Foto Pelaksanaan Kegiatan 2021	
6. Foto Sertifikat Penghargaan BKD Tahun 2021	
7. Alamat Website dan Media Sosial BKD Provinsi NTT	

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam mendukung hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sesuai regulasi (*legitimate*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publicgood and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan),sedangkan praktek terbaiknya disebut “ *good governance* “ (kepemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas,profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Badan kepegawaian Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKIP Tahun 2021 berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, dan Outcomes*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Gubernur kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2021.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dan disampaikan dengan maksud untuk memberikan informasi tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur dan segenap *stakeholders* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan program kerja selama tahun 2021.

Selain itu laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah :

- a) Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat;
- b) Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
- c) Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan menengah.

### 1.3. Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

#### a. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2019, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bab II pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa ;

***"Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pembinaan KORPRI yang menjadi kewenangan Daerah".***

#### b. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

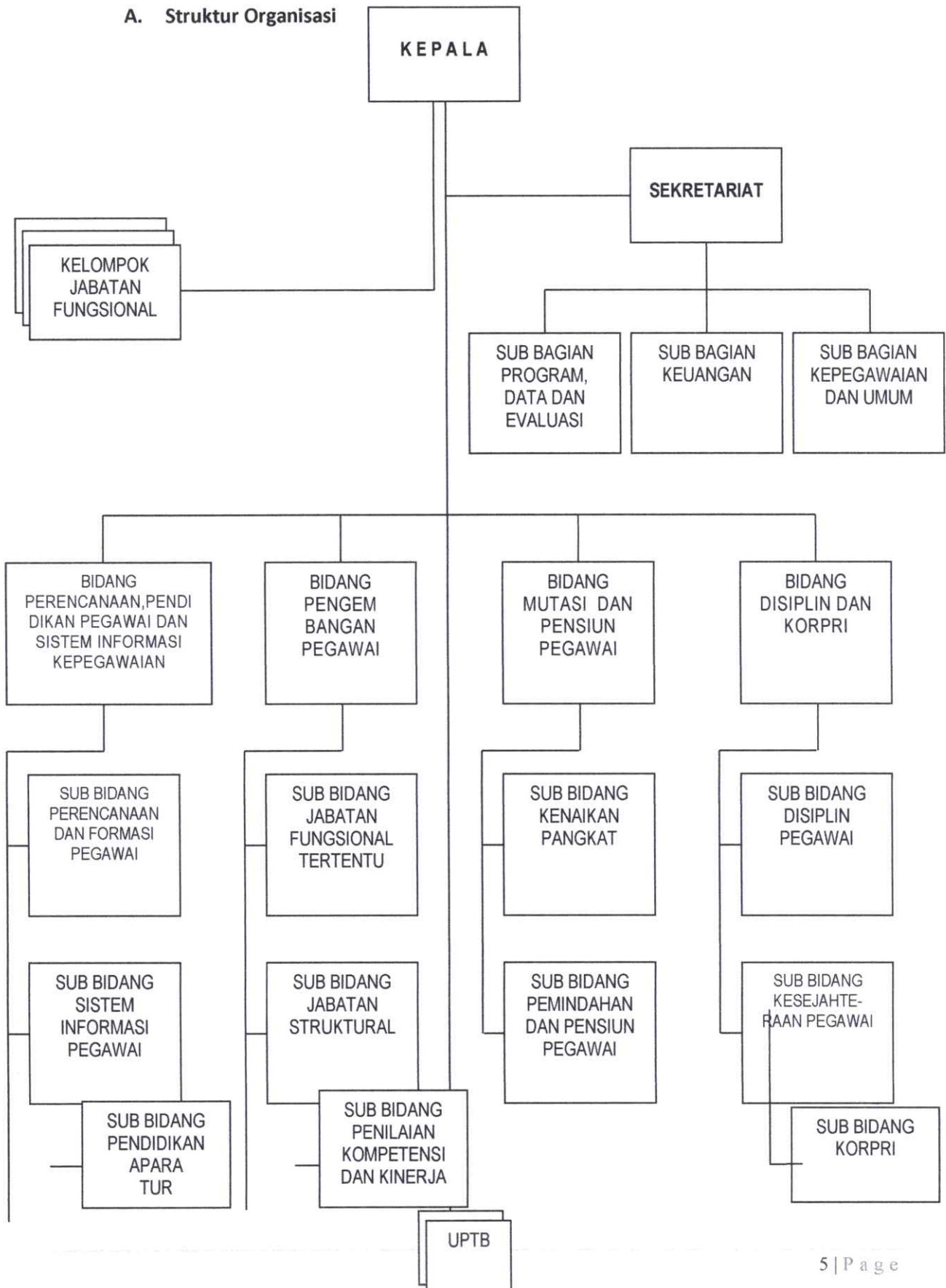
Selain itu, Dalam Bab IV pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan KORPRI yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang Kepegawaian Daerah dan pembinaan KORPRI;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian Daerah dan KORPRI;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian Daerah dan Pembinaan KORPRI;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian daerah dan Pembinaan KORPRI;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing.

#### 1.4. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai

##### A. Struktur Organisasi



## B. Jumlah Pegawai

Sumber daya manusia aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah kondisi 31

Desember 2021 adalah sebanyak 88 orang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	1 orang	II-a	Ada
2.	Sekretaris	1 orang	III-a	Ada
3.	Kepala Bidang	4 orang	III-a	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	15 orang	IV-a	Terisi hanya 13 (2 pensiun)
5.	Fungsional Arsiparis	1 orang	--	Ada
6.	Fungsional Pranata SDM Aparatur Penyelia	3 orang	--	Ada
7	Fungsional Analisis SDM Aparatur Pertama	4 orang	--	Ada
8	Fungsional Analisis Analisis SDM Aparatur Muda	5 orang	--	Ada
9	Fungsional Pranata Komputer Pertama	3 orang	--	Ada
10	Fungsional Pranata Komputer Muda	2 orang	--	Ada
11	Fungsional Assessor SDMA Muda	2 orang	--	Ada
12	Fungsional Assessor SDMA Pertama	5 Orang	--	Ada
13	Fungsional Umum	42 orang	--	Ada
<b>TOTAL PNS</b>		<b>88 orang</b>		

### 1.5. Dasar Hukum Penyusunan LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan, mengenai kewajiban untuk berakuntabilitas kepada publik. Landasan hukum tersebut diantaranya:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI nomor 53 tahun 2014;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI nomor 89 tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

#### **1.6. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 terdiri dari;

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Tugas dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai
- 1.5. Dasar Pelaksanaan
- 1.6. Sistematika Penyusunan

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

- 2.1. Rencana Strategis 2018-2023
- 2.2. Rencana Strategis Tahun 2021

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.3. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan APBD tahun 2020

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran serta Langkah Antisipatif

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Perubahan 2021

2. Rencana Kinerja Tahun 2021

3. Foto Pelaksanaan Kegiatan di tahun 2021

4. Foto Sertifikat Penghargaan yang diterima BKD Provinsi NTT

5. Alamat Website dan Media Sosial BKD Provinsi NTT

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem NKRI. Dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

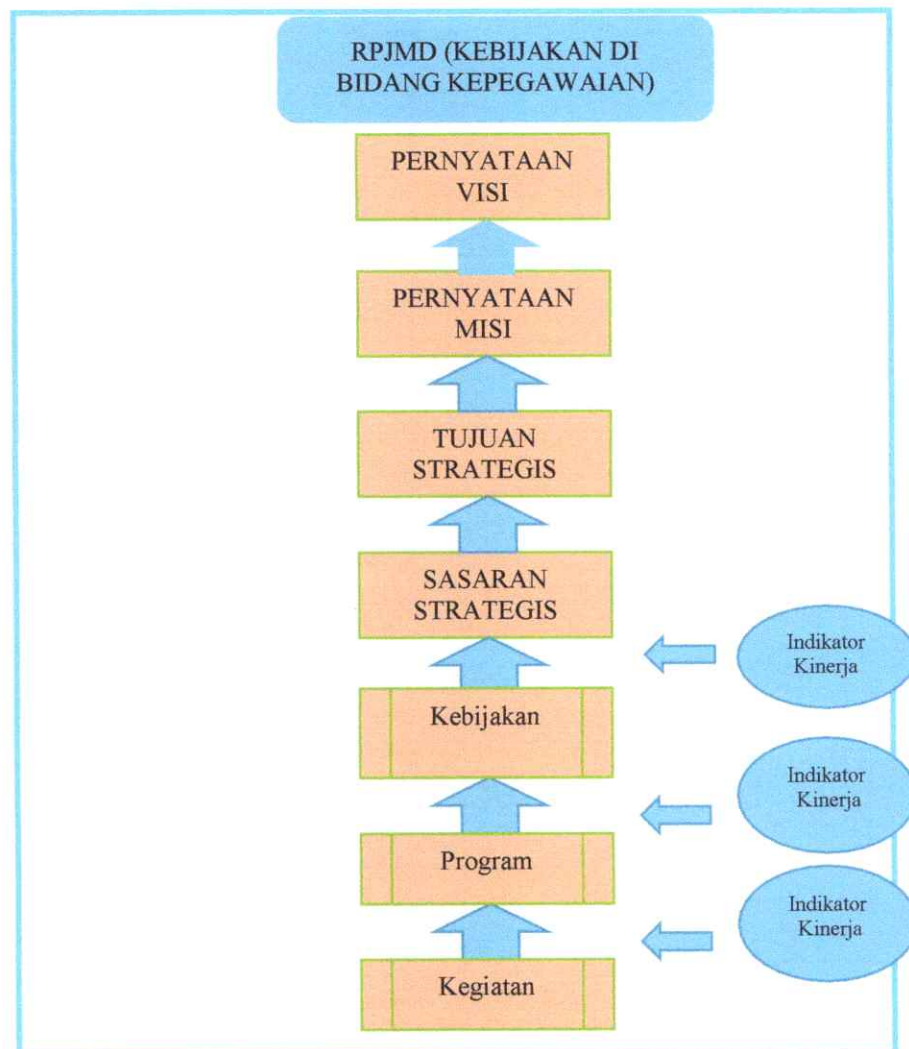
#### **2.1 RENSTRA 2018 - 2023**

Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perumusan Rencana Strategis (Renstra) tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal (kualitatif) sampai dengan yang paling teknis (kuantitatif). Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang saling terkait dalam mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi. Model Perumusan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti pola alur pikir sebagai berikut :

##### **2.1.1 Visi dan Misi**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dengan semangat "**NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**", serta mewujudkan Misi ke 5 ( Lima) yaitu; 'mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik' yang dijabarkan sebagai berikut yaitu : Mewujudkan optimalisasi penerapan sistem Manajemen ASN;

TABEL PENJABARAN RPJMD DAN RENSTRA TAHUN 2018- 2023



### 2.1.1 Tujuan

- a. Menyediakan dan menempatkan sumber daya aparatur daerah sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.
- c. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian berbasis teknologi.
- d. Mewujudkan disiplin aparatur pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

### **2.1.2 Sasaran**

- a. Terwujudnya perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi;
- b. Terwujudnya Pengembangan Pegawai;
- c. Terwujudnya Proses Administrasi Mutasi dan Pensiun;
- d. Terwujudnya Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan dan fasilitasi KORPRI

## **2.2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 yang telah ditetapkan/ termuat dalam RENSTRA. Agar pencapaian terhadap masing-masing sasaran meningkat maka harus melaksanakan program dan kegiatan- keguatan yang tertera dalam RENSTRA secara tepat .Berikut ini adalah rincian Kegiatan dalam Rencana strategis BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

TABEL RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TAHUN 2021																
								TARGET	RP															
1	Menciptakan Birokasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN	Meningkatnya Kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Terwujudnya Manajemen ASN yang berkualitas dan Profesional	KEPEGAWAIAN DAERAH			Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi																	
												PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya proses penerimaan CPNS, PPPK dan Formasi ASN	507	450	2.078.022.177					
																				Tertindakannya proses penyusunan Grand Design SDM ASN	Terlaksananya kegiatan sumpah janji PNS	360	743	181.500.000

			<b>Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN</b>	Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar dan penerima beasiswa dari pihak ketiga	38	22	2.413.940.804	
			<b>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</b>	Tersedianya SK Pensiun PNS	450	491	406.192.765	
				Penempatan PNS provinsi Kab/ Kota se- NTT yang menjadi kewenangan pprovinsi dan alih status PNS	1500	1815	217.561.630	
				Terlaksananya Musyawarah Provinsi dan Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	1	1	150.000.000	
				Terlaksananya Pembinaan Rohani Gabungan Anggota KORPRI	12	12	270.127.660	
				Terbentuknya Paduan Suara KORPRI Pemerintah Provinsi NTT	22	22	316.800.000	
			<b>Fasilitasi Lembaga Profesi ASN</b>	Terlaksananya Penyelenggaraan HUT KORPRI Tingkat Prov. NTT	1	1	80.000.000	
				Terlaksananya Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI melalui LKBH KORPRI	5	5	100.800.000	









### **2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan sepakati antara pihak yang menerima amanah/ pengembalian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang menerima amanah /tugas dan tanggung jawab kinerja dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Gambaran mengenai sejauhmana keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2021. Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas agar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, sehingga perlu ditetapkan aktifitas-aktifitas yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang di tandatangani di awal bulan Januari dengan total anggaran sebesar Rp. 21.683.106.789,- untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Sub kegiatan Penunjang Non Urusan maupun Kepegawaian Daerah, lalu pada Awal Desember 2021 karena terjadinya refocusing anggaran yang perubahan pada prioritas kegiatan/ sub kegiatan maka dilakukan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

Adapun aktifitas / kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dapat diuraikan melalui matriks sebagaimana terlampir.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2020	TARGET 2021	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi Pegawai. 2. Proses Administrasi Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai. 3. Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan ASN, dan Fasilitas KORPRI. 4. Pengembangan ASN.	Presentase Formasi Jabatan Sesuai Kualifikasi dan Kompetensi  Terlaksananya Lelang Jabatan Terbuka dan Akuntabel untuk Eselon 4,3,2, dan 1 Lingkup Provinsi	92 %  100 %	100%  100%	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan, serta Partisipatif	Meningkatnya Birokrasi yang Profesional dengan Karakteristik Adaptif, Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih, dan Bebas KKN	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

**A. APBD PROGRAM**

1. Penunjang Non Urusan
2. Kepegawaian Daerah

**B. APBN PROGRAM**

-

**C. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH SESUAI DENGAN TARGET DALAM APBD TA. 2021**

-

**ANGGARAN**

Rp. 9.308.867.429  
Rp. 12.374.239.360  
**Rp. 21.683.106.789**

Jumlah

Jumlah

Rp. -

Rp. -

- D. PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA  
TELAH TERKONTRAK PALING LAMBAT 31 MARET 2021
- E. PENYAMPAIAN LKPD, LKPJ, LPPD DAN LKIP PALING LAMBAT 31 JANUARI 2021
- F. NILAI PELAKSANAAN SAKIP MINIMAL BB;
- G. NILAI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI MINIMAL BB;
- H. TELAH MENERAPKAN PPK ONLINE 100%;
- I. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK DAN APIP SEBAGAI BERIKUT:
  - TEMUAN DIBAWAH 2019; ADMINISTRASI 100%, NON ADMINISTRASI 75%
  - TEMUAN TAHUN 2019 KE ATAS HARUS 90- 100%
- J. TELAH BERSERTIFIKASI MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015;
- K. PALING KURANG MENGHASILKAN 5 INOVASI;
- L. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH SESUAI TARGET DALAM APBD T.A. 2021

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018- 2023 yang pelaksanaan pencapaiannya termuat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) .

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sararan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja:

#### **3.1. PENGUKURAN KINERJA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**

Di tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menjawab tuntutan pemerintah pusat dan daerah ataupun untuk menjawab kebutuhan pelayanan kepada masyarakat se Nusa Tenggara Timur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di di daerah, telah menetapkan Visi dan misi untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam RPJMD 2018- 2023.

Dalam RPJMD Provinsi NTT yang telah ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengemban misi strategis ke Lima yaitu; mewujudkan Reformasi Birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di dalamnya termuat 1 (satu) sasaran strategis yaitu: Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. Untuk menjawab sasaran strategis dan Indikator pada RPJMD maka Badan Kepegawaian menetapkan Sub Sasaran strategis yaitu; pembinaan dan pengembangan kepegawaian dan Sub Indikator- sub indikator agar setiap program dan kegiatan BKD dapat lebih jelas dan mudah . Cara melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yang dapat jelaskan sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

**Atau:**

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Sedangkan metode penyimpulan Capaian sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Nilai Angka	Kategori Capaian (Interprestasi)
1	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
2	$75\% \leq X < 85\%$	Berhasil
3	$55\% \leq X < 75\%$	Cukup Berhasil
4	$X < 55\%$	Belum Berhasil

Dalam dokumen resmi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, termuat 1 (satu) sasaran inti yang diemban oleh Badan kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengemban visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran tersebut yaitu; Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. Dari sasaran ini telah dijabarkan 2 (dua) indicator kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian terhadap pencapaian RPJMD, adapun indicator tersebut yaitu (1). Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi; dan (2). Terlaksananya lelang jabatan terbuka akuntabel untuk eselon 2 dan 1 lingkup Provinsi NTT.

Selanjutnya untuk menjabarkan sasaran program dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka disusunlah RENSTRA (Rencana Strategis) Badan Kepegawaian Daerah yang memuat sasaran- sasaran kecil berdasarkan bidang- bidang teknis pengelola kegiatan pada unit kerja tersebut serta merincikan berbagai kegiatan-kegiatan untuk menjawab sasaran-sasaran tersebut ataupun bahkan menjawab sasaran di RPJMD.

Berikut adalah sasaran-sasaran pada RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus merupakan nama Kegiatan besar pada masing-masing bidang, antara lain:

1. Terwujudnya Manajemen ASN berkualitas dan Profesional
2. Terwujudnya Mutasi dan Promosi ASN
3. Terwujudnya Pengembangan Kompetensi ASN
4. Terwujudnya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5. Terwujudnya Urusan Penunjang Administrasi Perkantoran

Berdasarkan RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 dan RENSTRA BKD Provinsi NTT, maka berikut dapat dijelaskan beberapa indikator yang menjadai acuan tercapainya sasaran Inti dan Sasaran-sasaran pendukung yang dapat dipaparkan dalam table sebagai berikut:

**A. SASARAN STRATEGIS PADA RPJMD 2018-2023;**

<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif</b>
----------------------	---

Secara garis besar sesuai dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, Badan Kepegawaian hanya memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sesuai dengan Misi ke- 5 (lima) yaitu mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah capaian untuk Indikator pertama sesuai dengan RPPJMD.

<b>INDIKATOR I</b>	<b>Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi</b>
--------------------	---

Berdasarkan nama indikator pertama, maka dapat ditentukan sub-sub indikator yang dapat menunjang pencapaiannya pada sasaran ini. Bahwa dari berbagai kegiatan dan sub-sub kegiatan yang telah dilakukan, hanya terdapat 3 (tiga) kegiatan/ sub kegiatan yang disiapkan sebelum seseorang menduduki suatu jabatan baik itu formasi PNS;

NO	Indikator Program	Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2020	2021			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2021
A	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	Perencanaan, pendidikan dan sistem informasi		orang	86.84	553	468	92.00	100	92.00
1			Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);	Orang	88.33	198	189	95.45	100	95.45
2			Seleksi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (CAPRA IPDN);	Orang	90.66	46	44	95.65	100	95.65
<b>RATA- RATA</b>								<b>95.55</b>	<b>100</b>	<b>95.55</b>

Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian terhadap indikator I RPJMD sebesar **95.55 %** dari target 100 % yang ditetapkan. Capaian ini lebih besar **3.55 %** dibandingkan dengan capaian di tahun 2020 yang mencapai **92,00%**, yang disebabkan karena factor kelulusan merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi secara pasti mengingat system yang serba kompetitif serta standar kelulusan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan peserta tes yang mengalami kegagalan dalam mengisi formasi yang disediakan oleh pemerintah.

**INDIKATOR II**
**Terlaksananya lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 2 dan 1 lingkup Provinsi**

Selain indikator diatas, berikut adalah pencapaian terhadap indikator kedua dari sasaran RPJMD Provinsi NTT. Indikator kedua lebih micro dan terperinci indikator pencapaiannya.

NO	Indikator Program	Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2020	2021			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2021
B	Terlaksananya lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 2, dan 1 lingkup provinsi	Pembangunan Pegawai	Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama	Orang	100	45	44	98.86	100	98.86
			Eselon 2	Orang	100	44	43	97.72	100	97.72
			Eselon 1 (Telah dilaksanakan pada tahun 2017)	Orang	100	1	1	100	100	100
<b>RATA- RATA</b>								<b>98.86</b>	<b>100</b>	<b>98.86</b>

Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian terhadap indikator II di RPJMD di tahun 2021 sebesar **98.86 %** lebih rendah **1.14 %** dibanding pencapaian tahun 2020 yang mencapai **100%**. Hal ini dikarenakan setelah 2 kali dilakukan seleksi/ Lelang terbuka dan pemetaan terdapat 1 Pejabat pimpinan Perangkat Daerah yang mengalami pergeseran/ mutasi ke jabatan lain sehingga menyebabkan 1 jabatan lowong yang berakibat tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dengan demikian maka total pencapaian kinerja terhadap Indikator (indicator 1 +2/2 = 95.55+98.86/2) yang merupakan sasaran di RPJMD 2018-2023 di tahun 2021 sebesar

97.20%. Jika dibandingkan dengan pencapaian indikator RPJMD ditahun 2020 sebesar 96.00 % maka telah terjadi peningkatan realisasi sebesar 1.20 % .

**B. SASARAN PADA RENSTRA BKD PROVISI NTT 2018-2023;**

Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan terjadi perubahan pada berbagai Program, kegiatan dan indikator yang sebelumnya telah termuat dalam RENSTRA Provinsi NTT. Perubahan ini juga terjadi dalam perumusan sasaran serta berbagai kegiatan dan sub indikator kegiatan yang menunjang capaian kinerja Badan Kepegawaian sehingga tidak semua sasaran dapat dibandingkan capaian dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan/ pergeseran kegiatan dalam masing-masing sasaran program/ kegiatan. Meski demikian, kita dapat membandingkan capaian sub indikator kegiatan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Berikut ini ada penjelasan masing-masing capaian Sasaran program/ kegiatan beserta Sub Indikator Kegiatan.

<b>SASARAN I</b>	<b>Terwujudnya Manajemen ASN berkualitas dan Profesional</b>
------------------	--

Dalam pencapaian Sasaran ini, telah ditetapkan dengan suatu Indikator Program/ Kegiatan, yaitu: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang mencakup berbagai Sub Kegiatan sebanyak 15 Kegiatan dan indikator output sebagaimana tertera dalam dokumen RENSTRA BKD Provinsi NTT (2018-2023), namun karena keterbatasan anggaran terjadi perubahan prioritas sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran sehingga hanya dapat di laksanakan 11 kegiatan/ sub kegiatan yang ditunjang anggaran di DPPA BKD Provinsi NTT tahun 2021 sebesar **Rp. 1.842.587.089**. Masing-masing kegiatan didukung oleh beberapa Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa Bidang/ Sub Bidang sesuai dengan tupoksi.

No	Indikator Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output dari Sub Kegiatan	Satuan	Data Dasar 2020	2021			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2021
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Proses Penyusunan Grand Design SDM ASN	keg	1	1	1	100	100	100
2		Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya kegiatan sumpah janji	Orang	360	743	0	0	0	0
3		Evaluasi Pengadaan ASN Dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Proses Penerimaan CPNS, dan Formasi ASN.	Orang	507	198	189	95.55	100	95.55
4			Terlaksana proses seleksi calon praja IPDN dan sekolah kedinasan .	Orang	63	46	44	95.65	100	95.65
5		Koordinasi pelaksanaan Administrasi pemberhentian	Tersedianya SK pensiun PNS .	SK	38	500	533	106.60	100	106.60

6			Penempatan PNS Provinsi dan alih status PNS .	SK	1815	325	283	87.07	100	87.07
7		Fasilitas lembaga profesi ASN	Terlaksananya musyawara Provinsi dan pengukuhan Dewan pengurus KORPRI Provinsi NTT.	Keg	1	1	1	100	100	100
8			Terlaksananya pembinaan Rohani Gabungan Anggota KORPRI .	Kali	12	12	12	100	100	100
9			Terbentuknya paduan suara KORPRI Pemerintah Provinsi NTT.	Anggota	22	28	28	100	100	100
10			Terlaksananya BIMTEK Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang akan memasuki masa persiapan pensiun .	Keg	2	0	0	0	0	0
11			Terlaksananya pekan Olahraga Seni dan Budaya Tingkat Provinsi .	Keg	1	0	0	0	0	0

12		Pengelolaan system informasi Kepegawaian	Tersedianya sistem informasi pegawai yang mudah diakses serta memuat seluruh informasi dan data ASN secara lengkap	Data ASN	1252	3.610	3.610	100	100	100
13		Evaluasi data ,informasi dan sistem informasi kepegawaian	Terlaksananya proses penyelesaian admistrasi kartu suami dan kartu istri	Karsu/karis	300	300	420	140	100	140
14			Terlaksananya penyelesaian proses administrasi rekomendasi cuti di luar tanggungan negara.	cuti	2	2	1	100	100	100
15			Tersebar luasnya informasi pemanfaatan tabungan perumahan bagi PNS	keg	2	2	0	0	0	0
RATA – RATA								102	100	102

## TABEL I

### PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN I :

Berdasarkan data capaian yang tertera diatas, maka pada Sasaran I pencapaian kinerja sebesar **102.26 %** dari target 100% yang ditetapkan. Pencapaian masing-masing Sub indikator pada sasaran pertama dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Terlaksananya Proses Penyusunan Grand Design SDM ASN**

Kegiatan ini baru dilaksanakan di tahun 2021 dan menghasilkan sebuah dokumen Grand Design Pengembangan SDM ASN Lingkup Provinsi NTT tahun 2020- 2024. Dokumen ini memuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pengelolaan Tenaga Honorer Tahun 2021 pada 34 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Direncanakan di Tahun 2021 dilaksanakan 1 kali kegiatan dan telah terealisasi sebanyak 1 kali kegiatan. Dengan demikian maka realisasi pencapaian sebesar 100% sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan pencapaiannya dengan tahun sebelumnya, karena ini merupakan salah satu terobosan baru yang dilaksanakan BKD Provinsi NTT sebagai panduan untuk menjawab kebutuhan terkait pengangkatan tenaga honorer.

**2. Terlaksananya kegiatan sumpah janji**

Di Tahun 2021 Kegiatan Sumpah Janji PNS tidak dilaksanakan karena tahun 2020 tidak ada pengadaan CPNS. Sehingga kegiatan ini tidak masuk dalam perhitungan LKIP 2021 karena tidak ada output yang dihasilkan sehingga Realisasi **0**. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 meski adanya pandemic Covid 19, pelaksanaan kegiatan sumpah janji dilaksanakan secara virtual dengan target sebesar 1.058 PNS dan telah direalisasi sebesar 1.058 PNS. Dengan demikian maka pencapaian sebesar **100 %**.

**3. Terlaksananya Proses Penerimaan CPNS dan Formasi ASN.**

Tahun 2021 seleksi pengadaan CPNS dilaksanakan untuk mengisi 198 formasi dan yang dinyatakan lulus formasi sebanyak 189 orang. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada maka pencapaian telah mencapai **100%**. Meskipun output dari kegiatan ini belum mencapai target yang ditetapkan dalam pemenuhan formasi yang ada. Berikut adalah pencapaian dari masing-masing sub Kegiatan

❖ **CPNS** : Jumlah Formasi Terisi/ Jumlah Formasi X 100 =  $189/198 \times 100 = 95.45 \%$

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan CPNS di tahun 2019 yang berlanjut sampai dengan tahun 2020 yang hanya mencapai Realisasi sebesar **83,23 %** atau lebih rendah **12,22%** jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2021. Sedangkan seleksi di tahun 2020 ditiadakan.

**4. Terlaksana proses seleksi calon praja IPDN dan sekolah kedinasan .**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengisi 46 formasi oleh Putra-Putri terbaik NTT, namun yang berhasil dinyatakan Lulus sebanyak 44 orang, sehingga 2 formasi yang lasih lowong diisi dengan jalur optimalisasi oleh peserta dari luar Provinsi NTT. Dengan demikian maka dapat dihitung Jumlah Formasi Terisi/ Jumlah Formasi X 100 =  $44/46 \times 100 = 95.65 \%$ . Jika dibandingkan dengan tahun 2020 , dimana Formasi Calon Praja IPDN sebesar 46 orang dan yang dinyatakan lulus sebesar 46 orang, sehingga capaian pada kegiatan ini mencapai **100%** maka terdapat selisih lebih rendah 4.35% dibandingkan dengan tahun lalu.

**5. Tersedianya SK pensiun PNS .**

Penyelesaian penyediaan SK Pensiun PNS di tahun 2021 ditarget sebanyak 500 SK dan telah terealisasi sebanyak 533 SK. Dengan demikian maka pencapaian sebesar **106.60 %**. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai **97.72 %**, maka ditahun ini telah terjadi peningkatan sebesar **8,88%** lebih tinggi capaiannya jika dibandingkan dengan tahun 2020. yang dikarenakan proses pensiun janda/ duda dan pensiun dini tidak bisa diprediksi sebelumnya berbeda halnya dengan proses pension karena sudah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) yang sudah pasti jumlahnya.

**6. Penempatan PNS Provinsi dan alih status PNS.**

Kegiatan ini ditahun 2021 ditargetkan menghasilkan 325 SK, namun yang dapat terealisasi sebesar 283 SK sehingga capaian sebesar **87.07 %**. Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2020 yang hanya mencapai **39.87 %**, maka tahun ini terjadi peningkatan lebih besar yaitu 47.2 %. Meski demikian masih jauh dari target yang diharapkan karena banyak permohonan pindah yang berkasnya dinyatakan tidak lengkap (BTL) sampai masa tenggat yang diberikan.

7. **Terlaksananya musyawarah Provinsi dan pengukuhan Dewan pengurus KORPRI Provinsi NTT.**

Kegiatan ini telah dilaksanakan di tahun 2021 sebanyak 1 kali kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga pencapaiannya mencapai 100%. Pencapaian ini sama dengan tahun 2020 yang mencapai 100 %

8. **Terlaksananya pembinaan Rohani Gabungan Anggota KORPRI .**

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 12 kali kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga mencapai realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 terkena dampak akibat pandemic covid 19 yang menimpa dunia, dari target 12 kali kegiatan yang ditetapkan hanya dapat terealisasi sebanyak 7 kali kegiatan sehingga menyebabkan pencapaian hanya sebesar 58.33 %. Berdasarkan data tersebut maka telah terjadi peningkatan tahun ini sebesar 41, 67%, karena metode yang digunakan seutuhnya dilaksanakan secara live streaming melalui Youtube.

9. **Terbentuknya paduan suara KORPRI Pemerintah Provinsi NTT.**

Ditahun 2021, jumlah anggota paduan suara yang ditargetkan sebanyak 28 orang yang terdiri dari 24 orang anggota penyanyi dan 4 orang pelatih dan sehingga dapat terealisasi 100 %. Hal ini sama seperti tahun 2020 BKD Provinsi yang juga mencapai 100 %.

10. **Terlaksananya BIMTEK Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang akan memasuki masa persiapan pensiun .**

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2021 sama seperti di tahun 2020 sebagai akibat adanya refocusing anggaran.

11. **Terlaksannya Pekan Olahraga Seni dan Budaya Tingkat Provinsi .**

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2021 sama seperti di tahun 2020 sebagai akibat adanya refocusing anggaran.

12. **Tersedianya sistem informasi pegawai yang mudah di akses serta memuat seluruh informasi dan data ASN secara lengkap.**

Ditahun 2021, Dari target 4.000 yang ditetapkan untuk memperbaharui data telah terealisasi sebanyak 7.963 data ASN yang telah dilakukan pemutakhiran dan sinkronisasi dengan sistem informasi Kepegawaian yang digunakan oleh BKD Provinsi NTT. Dengan demikian maka pencapaian sebanyak 199.07 % melebihi target yang ditetapkan 100%. Meski demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana capaian sebesar 241.04 % maka pencapaian tahun ini mengalami penurunan selisih sebesar 41,96 %.

**13. Terlaksananya proses penyelesaian admistrasi kartu suami dan kartu istri**

Tahun 2021 target pada kegiatan ini sebesar 300 orang dan telah terealisasi sebesar 420 orang sehingga mencapai **140 %** lebih besar dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Target yang ditetapkan di tahun 2020 yang pencapaian hanya sebesar **78,00 %**, maka tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar **62 %**.

**14. Terlaksananya penyelesaian proses administrasi rekomendasi cuti di luar tanggungan negara.**

Tahun 2021, kegiatan ini ditargetkan sebanyak 2 orang namun yang terealisasi sebanyak 1 orang, sehingga mengakibatkan pencapaian **50 %** dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan di tahun 2020 yang capaiannya sebesar **100%**, maka telah terjadi selisih lebih rendah di tahun 2021 sebanyak 50%. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini sifatnya yang bersifat kasuistis dan tidak dapat diprediksi.

**15. Tersebar luasnya informasi pemanfaatan tabungan perumahan bagi PNS.**

Tahun 2021 kegiatan ini ditargetkan pelaksanaan sebanyak 2 kali di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh Kab/ Ko ta se- NTT, namun tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pemotongan uang perumahan bagi ASN dari Juli 2020 s/d.31 Desember 2021, yang menyebabkan realiasi **0**. Hal ini berbanding terbanding dengan tahun 2020 yang realisasinya mencapai **100 %**.

<b>SASARAN II</b>	<b>Terwujudnya Mutasi dan Promosi ASN</b>
-------------------	---

Sasaran ditunjang oleh empat (4) Sub indikator dan anggaran sebesar **Rp. 1.108.371.090**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL II

## PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN II :

N O	Indikator Program/ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2020	2021			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2021
1	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan mutasi ASN	Terlaksananya kegiatan pembinaan karir	Keg	0	13	13	100	100	100
2		Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Terlaksananya proses penyelesaian administrasi kenaikan pangkat PNS kab/kota se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi	SK	80,78	4.500	3.944	87.64	100	87.64
3		Pengelolaan Promosi ASN	Lelang Terbuka, pemetaan dan pelantikan pejabat	kali	100	7	8	114.28	100	114.28

4		Monitoring Dan Evaluasi Terpadu	Monitoring dan evaluasi praja IPDN,PNS tubel/ibel asal pemprov NTT dan kinerja	kali	0	0	0	0	0	0
<b>RATA – RATA</b>								<b>100.64</b>	<b>100</b>	<b>100.64</b>

Berdasarkan data tersebut diatas maka pencapaian pada Sasaran II sebesar **100.64%** dari target 100 % yang ditetapkan yang berasal dari 3 capaian sub indicator kegiatan yang dilaksanakan. Penjelasan capaian pada Sasaran II dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Terlaksananya kegiatan pembinaan karir**

Kegiatan ini semula di targetkan sebanyak 23 kali berupa perjalanan dinas ke 23 Kab/ Kota, namun karena terjadi refocusing anggaran sehingga target dirubah menjadi 13 kali kegiatan dan telah terealisasi 13 kali kegiatan sehingga capaian mencapai **100%**.

**2. Terlaksananya proses penyelesaian administrasi kenaikan pangkat PNS kab/kota se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi**

Tahun 2021 target yang ditetapkan dalam rangka penyelesaian kenaikan pangkat PNS kab/kota se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 4.500 SK dan telah terealisasi sebesar 3.944 SK, sehingga pencapaian sebesar **87.64 %**. Hal disebabkan antara lain; Jumlah usulan yang sampaikan PD tidak banyak, penyampaian usulan sudah melewati batas waktu yang ditentukan serta banyaknya berkas usulan yang belum lengkap; seperti Kenjab maupun Rekomendasi Uji Kompetensi (Ujkom) dll. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang capaian sebesar **80.78 %**, maka terdapat selisih peningkatan ditahun 2021 sebesar **6.86%**.

**3. Lelang Terbuka, pemetaan dan pelantikan pejabat**

Pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2021 ditargetkan sebanyak 7 kali, namun realisasinya dilakukan sebanyak 8 kali, sehingga capaian menjadi **114.28%**. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 capaiannya sebesar **100 %**, maka terdapat selisih peningkatan di tahun ini sebanyak **4,28%**.

**4. Monitoring dan evaluasi praja IPDN,PNS tubel/ibel asal pemprov NTT dan kinerja**

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2021 sama seperti di tahun 2020 sebagai akibat adanya refocusing anggaran.

<b>SASARAN III</b>	<b>Terwujudnya Pengembangan Kompetensi ASN</b>
--------------------	--

Dalam Mencapai sasaran tersebut diatas, terdapat 6 (enam) Sub indikator kegiatan yang termuat dalam dokumen RENSTRA BKD Provinsi NTT (2018-2023), namun karena terjadi perubahan anggaran perlu dilakukan penyesuaian prioritas kerja yang didukung APBD dalam DDPD BKD Provinsi NTT sebesar **Rp. 1.814.616.820.-** sehingga hanya 2 (dua) Sub indikator kegiatan saja yang dapat dilaksanakan dan penghitungan capaiannya sebagai berikut;

**TABEL III**

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN III :**

NO	Indikator Program/ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2020	2021			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2021
1	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja	Sertifikat Kelulusan Bagi Peserta Yang Lulus Ujian Dan Ujian Dinas	Stilud	78.63	800	689	86.12	100	86.12

		rja ASN	Penyesuaian ljasah.							
2		Eval uasi Peng adan ASN Dan Peng adaa n ASN	Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar dan menerima beasiswa dari pihak ketiga	Orang	38	22	20	90.90	100	90.90
3			Kegiatan bimtek pembentukan karakter melalu camp pemimpin unggul.	Kali keg	0	0	0	0	0	0
4			Kegiatan karya tulisi ilmiah bagi guru SMA/SMK.	Kali keg	0	0	0	0	0	0
5		Pem bina an Jaba tan Fung sion	Pelantikan bagi pejabat fungsional yang baru diangkat dan yang mengalami Penyesuaian/p	Kali keg	0	0	0	0	0	0

		al ASN	eningkatan jabatan.							
6		Fasili tasi Peng emb anga n Karir Dala m Jaba tan Fung sion al	Kegiatan penyusunan grand design perhitungan kebutuhan dan pengembngan JFT.	Kali keg	0	0	0	0	0	0
<b>RATA – RATA</b>								<b>88.51</b>	<b>100</b>	<b>88.51</b>

Berdasarkan data tersebut diatas, Sub indicator yang digunakan untuk menjawab sasaran ini hanya bersumber dari 2 (dua) Sub indicator yaitu; Penyelesaian Sertifikat Kelulusan Bagi Peserta Yang lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah dan terlaksananya pemberian batuan bagi PNS yang sedang tugas belajar dan menerima beasiswa dari pihak ketiga, sehingga pencapaian sasaran ini di tahun 2021 sebesar **88.51 %** sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Sertifikat Kelulusan Bagi Peserta Yang Lulus Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah.**

Target peserta yang mengikuti Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah sebanyak 800 orang dan yang telah dinyatakan lulus ujian sebanyak 689 orang sehingga capaian sebesar **86.12%**. Hal ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena peserta tidak memenuhi syarat yang ditetapkan serta usulan dari Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota bagi PNS yang akan mengikuti ujian tidak banyak. Meskipun demikian, terjadi peningkatan sebesar **7,49%** dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai **78.63%**.

**2. Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar dan menerima beasiswa dari pihak ketiga.**

Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar di tahun 2021 sebanyak 20 dari 22 formasi yang tersedia, sehingga realisasi mencapai 90.90%. Hal ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu (2020), karena kegiatan ini ditiadakan akibat adanya refocusing anggaran dimasa Pandemi Covid 19. Namun untuk tahun 2019, realisasi mencapai 90.47 % yang artinya terjadi peningkatan realisasi di tahun 2021 sebesar 0,43%.

**3. Kegiatan bimtek pembentukan karakter melalui camp pemimpin unggul.**

Meskipun kegiatan ini termuat dalam dokumen RESNTRA BKD Provinsi NTT, namun kegiatan ini tidak dapat dilakukan di tahun 2020 dan 2021, sehingga tidak dapat dihitung dalam pembagian capaian sasaran ini.

**4. Kegiatan karya tulis ilmiah bagi guru SMA/SMK.**

Meskipun kegiatan ini termuat dalam dokumen RESNTRA BKD Provinsi NTT, namun kegiatan ini tidak dapat dilakukan di tahun 2020 dan 2021, sehingga tidak dapat dihitung dalam pembagian capaian sasaran ini.

**5. Pelantikan bagi pejabat fungsional yang baru diangkat dan yang mengalami Penyesuaian/peningkatan jabatan.**

Meskipun kegiatan ini termuat dalam dokumen RESNTRA BKD Provinsi NTT, namun kegiatan ini tidak dapat dilakukan di tahun 2020 dan 2021, sehingga tidak dapat dihitung dalam pembagian capaian sasaran ini.

**6. Kegiatan penyusunan grand design perhitungan kebutuhan dan pengembangan JFT.**

Meskipun kegiatan ini termuat dalam dokumen RESNTRA BKD Provinsi NTT, namun kegiatan ini tidak dapat dilakukan di tahun 2020 dan 2021, sehingga tidak dapat dihitung dalam pembagian capaian sasaran ini.

SASARAN IV	Terwujudnya Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur
------------	---

Dalam Mencapai sasaran tersebut diatas, terdapat Tujuh (7) Sub indikator kegiatan-kegiatan mendukung pencapaian realisasi ini serta anggaran APBD sebesar **Rp. 488.829.130.-** yang dapat dijabarkan dalam tabel IV sebagai berikut;

TABEL IV

## PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN IV :

NO	Indikator Program	Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2020	2021			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2021
1	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Uji kompetensi bagi pejabat pengawas dan pejabat pelaksana.	Orang	100	30	49	163	100	163
2			Terlaksananya Assesment Center.	Sarpras/paket	100	14	14	100	100	100
3			Kegiatan pendampingan dan pelatihan aplikasi SKP	Orang	100	630	540	85.71	100	85.71

			online bagi ASN pad UTD ASM/S MK/SLB lingkup pemprov NTT di kota/ka b.							
4		Pembinaan Disiplin ASN	Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XX X tahun dan pemberian penghargaan bagi PNS yang telah memasuki	Orang	129.25	353	353	100	100	100

			purna tugas/purna bakti							
5			Persentase hasil evaluasi kehadiran PNS.	Keg	100	52	52	100	100	100
6		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Proses penanganan PNS yang bermasalah.	PNS	100	20	77	385	100	385
7		Evaluasi Disiplin ASN	Rapat dewan pertimbangan kepegawaian	keg	100	1	1	100	100	100
<b>RATA – RATA</b>								<b>147.67</b>	<b>100</b>	<b>147.67</b>

Berikut ini uraian capaian indikator- indikator kegiatan yang dilakukan untuk menjawab sasaran keempat di tahun 2021 sebagai berikut:

**1. Uji kompetensi bagi pejabat pengawas dan pejabat pelaksana.**

Tahun 2021 telah dilakukan uji kompetensi bagi pejabat pengawas/ Kepala Bangsal/ Kepala Laboratorium/ Lingkup RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang dengan target 30 orang PNS.

Namun antusiasme PNS sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini sehingga menyebabkan realisasi meningkat menjadi 49 PNS sehingga capaian menjadi **163%**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang capaian sebesar **100 %**, maka terjadi selisih peningkatan lebih tinggi di tahun 2021 sebesar **63 %**.

**2. Terlaksananya Assesment Center.**

Dalam rangka menilai keterampilan, pengetahuan dan kemampuan ASN, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan salah satu metode yang dianggap paling valid dibandingkan metode lain yaitu Assessment Center. Tahun 2021 telah ditetapkan target 1 kegiatan dan telah direalisasi 1 kegiatan sehingga capaian **100%**. Untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana dapat di Lihat pada Tabel Sasaran V. Jika dibandingkan dengan tahun lalu (2021), BKD juga menggunakan metode ini untuk menilai PNS dengan capaian **100%**.

**3. Kegiatan pendampingan dan pelatihan aplikasi SKP online bagi ASN pada UTD SMA/SMK/SLB lingkup pemprov.NTT di kota/kab.**

Tahun 2021 kegiatan ini semula ditargetkan untuk 22 Kab/ Kota se- NTT dengan masing-masing kuota untuk 30 PNS. Namun karena terjadi refocusing anggaran sehingga target di rubah menjadi 19 dan telah direalisasikan sebanyak 19 sehingga capaian **100 %** dengan total PNS yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 570 orang. Capaian ini sama dengan tahun 2020 yang juga mencapai **100%**.

**4. Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX tahun dan pemberian penghargaan bagi PNS yang telah memasuki purna tugas/purna bakti**

Kegiatan semula ditarget ditargetkan 2 kali pelaksanaan yaitu pada bulan Agustus dan Desember dengan total peserta 900 PNS. Namun karena terjadi refocusing anggaran sehingga target di rubah menjadi 1 kali kegiatan dan telah direalisasikan sesuai target sehingga capaiannya **100%** dengan jumlah PNS sebanyak 353 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaiannya mencapai **129.25%**, maka tahun 2021 mengalami selisih lebih rendah sebesar **29, 25 %**.

**5. Presentasi hasil evaluasi kehadiran PNS.**

Untuk mendukung capaian kegiatan ini ditahun 2021 telah ditargetkan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) yang hanya dilaksanakan di 14 Kabupaten dan 38 PD Lingkup Provinsi NTT sebagai akibat adanya refocusing anggaran. Sehingga target ditetapkan 52 kali keg dan telah

direalisasikan sebanyak 52 dengan capaian 100%. Untuk kegiatan presentase hasil tidak dapat dilaksanakan sama seperti di tahun 2020 karena adanya pandemic covid dan refocusing anggaran.

**6. Proses penanganan PNS yang bermasalah.**

Kegiatan ini tahun 2021 ditargetkan untuk penanganan PNS sebanyak 20 orang yang terkena masalah penjatuhan hukuman ataupun kasus indisipliner. Ternyata dalam pelaksanaannya terjadi peningkatan PNS yang bermasalah sehingga telah terealisasi sebanyak 77 orang PNS yang diproses dan dijatuhi surat Keputusan Hukuman Disiplin. Dengan demikian maka capaian sebesar **385 %**. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana capaiannya sebesar **167.56%**, maka tahun ini terjadi selisih peningkatan penanganan PNS bermasalah sebanyak **217.44%**.

**7. Rapat dewan pertimbangan kepegawaian**

Tahun 2021 kegiatan ini dilaksanakan 1 kali pelaksanaannya dan telah terealisasi sesuai dengan target untuk membahas 15 PNS yang terkena masalah. Dengan demikian maka capaian sebesar **100 %**, hal ini sama dengan pencapaian di tahun 2020 sebesar **100%**.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk sasaran IV BKD Provinsi NTT di tunjang oleh 7 (tujuh) Sub Indikator Kegiatan dengan total capaian rata-rata sebesar **147, 67 %**.

SASARAN V	Terwujudnya Administrasi Perkantoran
-----------	--------------------------------------

Secara garis besar, untuk mencapai sasaran ini maka ditetapkan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi beserta 7 (tujuh) Sub indicator yang salah satu fungsinya untuk mewujudkan administrasi perkantoran. Namun untuk menjawab sasaran RENSTRA BKD Provinsi NTT (2018-2023), untuk menjawab sasaran hanya bersumber dari 1 (satu) Sub indicator sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

NO	Indikator Program	Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2020	2021			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2021
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Peran Aktif Daerah	Terlaksananya Rakor Bidang Kepegawaian	Keg	100	1	1	100	100	100
<b>RATA- RATA</b>								<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Tahun 2021, target pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan 1 kali kegiatan dan telah direalisasi sebanyak 1 kali kegiatan sehingga capaian **100%**. Capaian ini sama dengan tahun 2020 yaitu 100%.

Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas maka total pencapaian terhadap Sasaran RENSTRA (Sasaran I, II, III, IV dan V) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Sasaran RENSTRA} &= (102.26 + 100.64 + 88.51 + 147.67 + 100) / 5 \\
 &= 539.08 / 5 \\
 &= \mathbf{107.81}
 \end{aligned}$$

Pencapaian pada sasaran Renstra tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian sasaran di tahun 2020 dikarenakan perubahan regulasi yang berakibat pada perubahan sasaran program/ kegiatan serta berbagai sub indikator kegiatan yang menunjang hasil pencapaiannya.

### 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami realokasi/ refokusing anggaran sebanyak 3 (tiga) kali sehingga banyak target yang telah ditetapkan di awal tahun harus di rasionalisasi kembali sesuai dengan tuntutan kebutuhan strategis di Provinsi NTT. Pencapaian Sasaran Strategis yang dicapai tahun 2021, didukung dengan dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 19.139.090.690,-** dengan rincian (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar **Rp.13.884.686.561,-**, dengan realisasi mencapai **Rp. 13.458.721.036,-** atau **96.93 %** dan (2).Program Kepegawaian Daerah sebesar **Rp. 5.254.404.129,-** dan realisasi mencapai **Rp. 5.086.209.229 -** atau **96.79 %**. Dengan demikian maka total realisasi untuk Kedua Program di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebesar **Rp. 18.554.930.265,-** menyebabkan pengembalian ke kas daerah sebesar **Rp. 584.160.425,-**. Meskipun demikian secara fisik kedua program ini telah dilaksanakan **100%**.

**ALOKASI DAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH PROVINSI NTT TAHUN 2021**

NO	Kegiatan/ Program	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>13.884.686.561</b>	<b>13.458.721.036</b>	<b>96,93%</b>
1.	Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.389.760	137.083.760	99,77%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.141.651.600	9.821.893.128	96,86%
3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	93.428.400	93.428.400	100%
4	Administrasi kepegawaian Umum Perangkat Daerah	443.224.530	429.025.530	96,79%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.558.203.721	2.472.066.544	96,63%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	408.419.300	408.084.924	99,91%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.369.250	97.138.750	94,89%
II	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>5.254.404.129</b>	<b>5.086.209.229</b>	<b>96,79%</b>
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.842.587.089	1.714.801.799	93,06%
2	Mutasi dan Promosi ASN	1.108.371.090	1.083.917.030	97,79%
3	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.814.616.820	1.804.190.220	99,42%

4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	488.829.130	483.300.180	98,86%
TOTAL ANGGARAN		19.139.090.690	18.554.930.265	96,89%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berupaya maksimal dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan maupun dalam memberikan pelayanan prima kepada berbagai pemangku kepentingan dengan cara mengikuti perubahan secara optimal sesuai dengan teknologi serta regulasi yang berlaku. Selain itu, meskipun terjadi realokasi anggaran/ refocusing anggaran, BKD tetap konsisten dalam menampilkan kinerja dan prestasi, sebagai bukti Tahun 2021 meraih 4 (empat) buah penghargaan baik itu dari Gubernur NTT dan maupun dari Lembaga Independen di pusat.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT untuk menjawab RPJMD dan RENSTRA 2018-2023, namun karena ada perubahan Regulasi dari Pemerintah pusat turut mempengaruhi Program, kegiatan dan sub indicator sehingga hal ini tidak bisa dibandingkan pencapaian pada sasaran RENSTRA. Adapun penyusunan LKIP ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban secara terukur dan tranparan atas pelaksanaan rencana kinerja tahun 2021 sesuai dengan regulasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 belum sempurna, oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kebaikan bersama.

Berikut adalah rincian capaian ditahun 2021;

<b>A. CAPAIAN SASARAN RPJMD</b>				
<b>NO</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>CAPAIAN S/D TAHUN 2020</b>	<b>CAPAIAN 2021</b>	<b>KATEGORI 2021</b>
1	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	92.00	95.55	<b>SANGAT BERHASIL</b>
2	Terlaksananya lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk	100	98.86	<b>SANGAT BERHASIL</b>

	eselon 2 dan 1 lingkup Provinsi			
<b>RATA-RATA</b>		<b>96.00</b>	<b>97.20</b>	<b>SANGAT BERHASIL</b>
<b>B. CAPAIAN SASARAN RENSTRA</b>				
<b>NO</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>CAPAIAN S/D TAHUN 2020</b>	<b>CAPAIAN 2021</b>	<b>KATEGORI 2021</b>
1	Terwujudnya Manajemen ASN berkualitas dan Profesional	-	102.26	SANGAT BERHASIL
2	Terwujudnya Mutasi dan Promosi ASN	-	100.64	SANGAT BERHASIL
3	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi ASN	-	88.51	SANGAT BERHASIL
4	Terwujudnya Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	147.67	SANGAT BERHASIL
5	Terwujudnya Administrasi Perkantoran	-	100	SANGAT BERHASIL
<b>RATA-RATA</b>		<b>-</b>	<b>107.81</b>	<b>SANGAT BERHASIL</b>

Mengacu pada rencana strategi dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, terdapat 5 sasaran strategis sebagaimana telah dijabarkan indikator kinerjanya sampai pada hasil/ output terakhirnya. Hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaiannya. Dari hasil perhitungan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 diperoleh persentase capaian RPJMD rata-rata sebesar **97.20 %** dan Masuk katagori **SANGAT BERHASIL**, sedangkan capaian RENSTRA rata-rata sebesar **107.81 %** dengan daya serap anggaran secara keseluruhan tahun 2021 mencapai **96.89 %** atau selisih dari terget **3.11 %** dari Total anggaran sebesar **Rp. 19.139.090.690** dalam DPPA 2021.

Mengenai keberhasilan, hambatan dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

#### 4.1. **Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

Dari uraian mengenai pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan yang pada tahun 2021 sesuai dengan **RENSTRA** telah terselenggara dengan sangat berhasil, terbukti dengan tingkat capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai nilai rata-rata **107.81 %** dari target yang ditetapkan sebesar 100% dalam Renstra tahun 2021 serta terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai **99.09%**, walaupun semestinya tidak bisa dibandingkan secara tepat karena terjadi perubahan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran di tahun 2020 dan 2021. Untuk pencapaian indicator Sasaran pada RPJMD mencapai nilai rata-rata sebesar **97.20 %** ada kenaikan sebesar **1.20 %** jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai **96.00 %**, hal ini disebabkan karena keberhasilan peserta dalam mengisi formasi ASN sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan dan kompetensi peserta seleksi itu sendiri. Apabila dihitung secara kinerja, pada prinsipnya BKD Provinsi telah melaksanakan secara profesional dengan capaian **100 %**.

#### 4.2. **Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran serta langkah antisipatif.**

Dalam pelaksanaan kegiatan dan implementasi kebijakan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi beberapa kendala diantaranya:

1. Beberapa kegiatan/ Sub Indikator kegiatan yang telah direncanakan dalam RENSTRA untuk dilaksanakan di tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari adanya refocusing anggaran sebanyak 3 kali di tahun 2021 untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih prioritas;
2. Penerapan aturan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSPB) mengakibatkan kegiatan yang harus dilakukan dalam skala besar ditiadakan dan harus menggunakan metode daring. Namun disisi lain, mitra kerja yang tersebar di kabupaten/ kota kita belum memiliki sumber daya yang optimal.
3. Selain itu terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan secara daring (dalam jaringan) dan masih terkesan baru serta kemampuan Sumber Daya Manusia dalam menggunakan teknologi di kabupaten/Kota se NTT yang kurang

optimal menambah sederet masalah dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan ;

4. Kurang optimalnya Koordinasi terkait pekerjaan antara pemerintah Kab/ Kota dengan Pemerintah Provinsi NTT yang mengakibatkan terjadinya temuan dilapangan yang mengindikasikan adanya ketidakpahaman terhadap regulasi yang ada maupun kecenderungan untuk mengambil langkah-langkah yang inprosedural.
5. Belum tersinkronnya data base kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dengan kondisi riil ASN;
6. Seleksi yang kompetitiv namun kurang didukung oleh persiapan pra seleksi yang matang sehingga banyak peserta seleksi yang gagal dalam seleksi awal dan untuk tahun 2021 kegagalan lebih banyak bersumber dari calon PPPK. Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi NTT kehilangan banyak formasi CPNS.
7. Dibeberapa Perangkat Daerah masih ditemukan ketidaksesuaian rekapitulasi absen manual dengan rekapitulasi absen *finger print*.
8. Dalam Proses penyelesaian masalah PNS, terdapat PNS yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan pemeriksaan, sehingga menghambat proses pemeriksaan yang berdampak pada penyelesaian masalah secara tuntas. Demikian juga dalam pelaksanaan RDK harus disesuaikan dengan waktu pimpinan yang terlibat dalam kegiatan itu.
9. Proses kenaikan pangkat PNS menjadi kurang maksimal karena penyampaian usulan berkas telah melewati batas waktu yang ditentukan , selain itu Banyak pejabat Fungsional tertentu yang mengalami hambatan dalam melengkapi dokumen Kenaikan Jabatan maupun rekomendasi Uji Kompetensi dll.

#### 4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Badan kepegawaian Daerah telah berusaha mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, diantaranya dengan:

1. Untuk mempermudah dan mempercepat terselenggaranya pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dan mengusulkan kepada TAPD untuk memperkuat anggaran sesuai dengan substansi kebutuhan maupun


perencanaan yang termuat dalam RENSTRA, agar capaian dapat terukur setiap tahun dengan jelas;

2. Kondisi ditengah pandemic Covid 19 bukanlah menjadi penghambat keberhasilan dalam menjalani tugas dan fungsi pemerintahan maupun pelayanan. Merubah strategi penyelenggaraan tugas/pelayanan tatap muka dengan metode sosialisasi secara online/ daring menggunakan beberapa media social yang dimiliki seperti Youtube, Facebook, Instagram, Twitter dan Whats app. Selain itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT juga memiliki Website resmi yang selalu memberikan informasi terkini dan terpercaya bagi semua kalangan masyarakat.
3. Membangun koordinasi yang berkesinambungan antar instansi pengelola kepegawaian maupun dengan Perangkat Daerah terkait lainnya, baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian tugas secara tepat dalam bidang kepegawaian.
4. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan melekat secara berjenjang dan konsisten dari pimpinan yang lebih tinggi terhadap PNS yang dipimpinnya, agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan dapat menjawab kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Memperkuat Tim kerja BKD secara internal maupun pihak terkait secara eksternal agar bekerja sesuai dengan yang ditargetkan dalam Renstra, regulasi dan semangat pelayanan yang tinggi kepada Daerah ini;
6. Perlu dilakukan strategi perencanaan kebutuhan peningkatan kualitas SDM dan penyelenggaraan secara tepat dan berkesinambungan, yang merupakan kolaborasi antara pihak- pihak terkait baik yang ada di Pemerintah provinsi NTT, Pemerintah Pusat , swasta ataupun *stake holder* lainnya, sehingga dapat menghasilkan PNS Provinsi NTT yang berkualitas pula dalam melayani;
7. Perlu adanya penerapan dan penegakkan aturan yang ketat sehingga operator di perangkat daerah lebih jujur dan serius dalam menangani persoalan terkait;
8. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna penyelesaian tugas dengan tepat waktu;
9. Membangun tim kerja dengan pihak- pihak terkait agar tidak merugikan PNS dalam proses kenaikan pangkat.

Melalui penyusunan LKIP BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para penyelenggara pelayanan maupun pelaksanaan tugas pemerintahan di Lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lebih komprehensif dalam meningkatkan kualitas kerjanya yang semakin baik di masa mendatang. Keberhasilan ataupun kegagalan di tahun 2021 menjadi motivasi untuk keberhasilan lebih lanjut serta dasar penentuan kebijakan yang lebih baik guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 28 Januari 2021

 **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,** 

  
**HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19710707 199703 2 008**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lembaran Verifikasi Level 1 LKIP 2021

### BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTT

#### Catatan/koreksi:

1. Sistematika penulisan LKIP disesuaikan dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku .
2. Target dan realisasi kinerja yang termuat dalam tabel capaian kinerja per tahun didasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan.
3. Sesuaikan capaian kinerja atau output dari masing -masing kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2021 berdasarkan laporan kinerja tahunan yang disampaikan oleh masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Permasalahan dan solusi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021 sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Realisasi anggaran sesuaikan dengan laporan realisasi anggaran (LRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 desember 2021.

Kupang, 28 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**HENDERINA S.LAISKODAT, SP, M. SI**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 197107071997032008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M. Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTT**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

01 Desember 2021

6 Pihak Kedua

17 Pihak Pertama

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

**HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M. Si**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			REALISASI 2020	TARGET 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Terwujudnya Manajemen ASN yang berkualitas dan Profesional 2. Terwujudnya Mutasi dan Promosi ASN 3. Terwujudnya Pengembangan Kompetensi ASN 4. Terwujudnya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Formasi Jabatan sesuai Kualifikasi dan Kompetensi  Tertelaksananya Lelang Jabatan Terbuka dan Akuntabel Untuk Eselon I dan 2 Lingkup Provinsi	92 %  100%	100%  100%	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Rp.

**A. APBD PERUBAHAN**

**B. BELANJA PROGRAM**

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Kepegawaian Daerah

**ANGGARAN**

Rp. 13.884.686.561

Rp. 5.254.404.129

Rp. 19.139.090.690

Rp. -

Jumlah

**C. PENDAPATAN PERUBAHAN**

**D. APBN (TUGAS PEMBANTU/DEKONSENTRASI)**

**BELANJA PROGRAM**

- I. ....

**ANGGARAN**

Rp. -

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			REALISASI 2020	TARGET 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Terwujudnya Manajemen ASN yang berkualitas dan Profesional 2. Terwujudnya Mutasi dan Promosi ASN 3. Terwujudnya Pengembangan Kompetensi ASN 4. Terwujudnya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Formasi Jabatan sesuai Kualifikasi dan Kompetensi  Terlaksananya Lelang Jabatan Terbuka dan Akuntabel Untuk Eselon I dan 2 Lingkup Provinsi	92 %  100%	100%  100%	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

**A. APBD PERUBAHAN**

Rp.

**B. BELANJA PROGRAM**

**ANGGARAN**

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Rp. 13.884.686.561

2. Kepegawaian Daerah

Rp. 5.254.404.129

**Jumlah**

Rp. 19.139.090.690

**C. PENDAPATAN PERUBAHAN**

Rp. -

**D. APBN (TUGAS PEMBANTU/DEKONSENTRASI)  
BELANJA PROGRAM**

**ANGGARAN**

1. ....

Rp. -

2. ....  
Rp. -  
Jumlah Rp. -

**E. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN**

- 1. Belanja modal, realisasi fisik 100%.
- 2. Belanja operasi 100% dan realisasi anggaran 90%.
- 3. Dikecualikan belanja hibah dan belanja bansos serta belanja berdasarkan Pemerintah Pusat dan Kebijakan Gubernur realisasi menyesuaikan dengan kebijakan dimaksud.

**F. PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA TELAH TERKONTRAK PALING LAMBAT 31 MARET 2021**

**G. PENYAMPAIAN LKPD, LKPJ DAN LKIP PALING LAMBAT 31 JANUARI 2021**

**H. NILAI PELAKSANAAN SAKIP MINIMAL BB**

**I. NILAI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI MINIMAL BB**

**J. TELAH MENERAPKAN PPK ON LINE 100%**

**K. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK DAN APIP, SEBAGAI BERIKUT :**

- 1. Temuan di bawah Tahun 2019 : Administrasi 100% Non Administrasi 90-100%
  - 2. Temuan Tahun 2019 ke atas harus 100%
- L. TELAH BERSERTIFIKAT MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015**
- M. PALING KURANG MENGHASILKAN 5 (LIMA) INOVASI**

01 Desember 2021

  
6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M. SI

**RENCANA KERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			KONDISI AWAL 2020	2021			
1	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi  Terlaksananya lelang jabatan Terbuka dan Akuntabel untuk eselon 4,3,2 dan 1 lingkup Provinsi	92.00%	100 %	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Menciptakan Birokrasi yang Profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kupang, 15 Januari 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



**BENDERINA S. LAISKODAT, SP., M. SI**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19710707 199703 2 008

2

3

Tempat

### RENCANA AKSI

Nama Unit Kerja/Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun Anggaran : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RE NSTRA	TARGET	INDIKATOR KEGI/ SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. RPJMD									
Kepegawaian Daerah	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	100%	1. Seleksi CPNS	Mengadakan station mandiri Pemprov. NTT	Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas kegiatan daring	Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas kegiatan daring	Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring	Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Perencanaan, Pendidikan dan Aparatur, dan Sistem Informasi - Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai -</li> </ul>



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RESTRANSRA	TARGET	INDIKATOR KEGI/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2 untuk eselon 2 dan 1 lingkup Provinsi	3	4	5	6	7	8	9	10
		100%	1. Seleksi terbuka bagi JPTP	1. persiapan membuat aplikasi pendaftaran seleksi terbuka secara online dengan menggunakan google form	✓ Mengajukan rencana kerja seleksi kepada KASN ✓ Membuka pendaftaran seleksi JPTP Secara Online Melakukan Seleksi Administrasi, Kompetensi Manajerial dan Bidang kepada peserta seleksi	✓ Merampungkan laporan pelaksanaan seleksi ✓ Rekomendasi hasil Seleksi oleh KASN ✓ Tindak lanjut hasil seleksi.	1. Peserta mengingat sendiri kelengkapan dokumennya secara online pada link yang disediakan 2. Menjamin pelaksanaan penilaian rekam jejak yang akuntabel dan transparan 3. Mengurangi interaksi langsung antara peserta dan panitia seleksi, khususnya dalam masa Pandemi Covid-19 4. Dokumen yang diinput menjadi tanggungjawab peserta 5. Mengurangi kekeliruan pada saat pengimputan dokumen 6. Melaksanakan Prinsip Paperless	Bidang Pengembangan Pegawai/ Sub bidang Jabatan Struktural	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RE NOSTRA	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. RENSTRA 1. Perencanaan, Pendidikan dan Formasi		100%	1. Seleksi CPNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan station mandiri Pemprov. NTT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemprov NTT dapat menyelenggarakan Seleksi Penerimaan CPNS Berbasis CAT dengan menggunakan perangkat sendiri (efisiensi biaya sewa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Perencanaan, Pendidikan dan Aparatur, dan Sistem Informasi – Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai – Nini, Imam, Stephen</li> </ul>
		100%	2. Seleksi IPDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi sekolah kedinasan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring.</li> <li>Membuat video lengkap tentang seluruh tahapan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring.</li> <li>Pelaksanaan seleksi penerimaan Capra IPDN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring.</li> <li>Pelaksanaan seleksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi terkait seleksi penerimaan sekolah-sekolah kedinasan dapat disampaikan secara efektif kepada para pelajar yang ada di sekolah – sekolah negeri di seluruh NTT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang Perencanaan, Pendidikan Aparatur, dan Sistem Informasi – Sub Bidang Perencanaan dan</li> </ol>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RE NSTRA	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					seleksi yang ada pada SPCP IPDN agar memotivasi Calon peserta seleksi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan diri mengikuti SPCP IPDN tahun 2021		peneruimaan Capea IPDN	2. Meningkatkan minat dan antusiasme para pelajar untuk mengikuti seleksi sekolah kedinasan	Formasi Pegawai – Nini, Imam, Stephen 2. Seluruh PNS BKD Provinsi NTT
			3. Sumpah janji	penyelesaian kegiatan sumpah janji 2020 akan diakhiri dengan pembagian berita acara sumpah janji			3. Melakukan kegiatan pengambilan sumpah/janji PNS secara virtual pada lebih banyak titik lokasi di Kb/ Kota se-NTT utk menghindari penumpukan peserta sumpah janji dalam jumlah besar pada	CPNS yang telah diangkat menjadi PNS dapat mengikuti sumpah janji tanpa harus meninggalkan tugas	Bidang Perencanaan, Pendidikan, dan Sistem Informasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RE NSTRA	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4. Pemutakhiran data	1. Melakukan kegiatan penginputan/ updating data akan terus dilakukan sepanjang tahun 2021 karena data PNS akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. 2. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sinkronisasi data antara SIMPEG dan SAPK terutama terkait dengan kecocokan unit kerja/ instansi, data pangkat dan jabatan, dan data diklat/ kursus serta status kepegawaian ( aktif/ tidak aktif, pension/ meninggal, atau pindah wilayah kerja) 3. Melakukan kegiatan pendigitasian arsip PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTT akan terus dilakukan di tahun 2021 dan diupayakan agar berkas tenaga guru dan tenaga kependidikan pada SMA/SMK diseluruh Kab dan Kota yang belum didigitasi dapat diselesaikan dan terupload pada aplikasi SIMAE.			titik lokasi kegiatan	1. Tersajinya data PNS yang akurat 2. Tersinkronnya data SIMPEG dan SAPK 3. Tersedianya arsip digital yang lengkap.	Bidang Perencanaan/ Sub SIK
2. Pengembangan Pegawai			1. Seleksi terbuka bagi JPTP	-	persiapan membuat aplikasi pendaftaran seleksi terbuka secara online dengan menggunakan google form	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengajukan rencana kerja seleksi kepada KASN</li> <li>✓ Membuka pendaftaran seleksi JPTP Secara Online</li> <li>✓ Melakukan Seleksi Administrasi, Kompetensi Manajerial dan Bidang kepada peserta seleksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Merampungkan laporan pelaksanaan seleksi</li> <li>✓ Rekomendasi hasil Seleksi oleh KASN</li> <li>✓ Tindak lanjut hasil seleksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta menginput sendiri kelengkapan dokumennya secara online pada link yang disediakan</li> <li>2. Menjamin pelaksanaan penilaian rekam jejak yang akuntabel dan transparan</li> <li>3. Mengurangi interaksi langsung antara peserta dan panitia seleksi, khususnya dalam</li> </ul>	Bidang Pengembangan Pegawai/ Sub bidang Jabatan Struktural

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RE NSTRA	TARGET	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan Ulang Pejabat Fungsional Tertentu melalui aplikasi SITA-JAFUNG(bit.ly/jafungnt) (Januari-Februari)</li> <li>• Kota Kupang (Maret)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Kupang(April)</li> <li>• Kab. TTS (Mei)</li> <li>• Kab. TTU (Juni)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Alor (Juli)</li> <li>• Kab. Lembata (Agustus)</li> <li>• Kab. RoteNdao (September)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Kupang (Oktober)</li> <li>• Kab.Sabu Raijua (November)</li> <li>• Kab.Belu (Desember)</li> </ul>	<p>masa Pandemi Covid-19</p> <p>4. Dokumen yang diimput menjadi tanggungjawab peserta</p> <p>5. Mengurangi kekeliruan pada saat pengimputan dokumen</p> <p>6. Melaksanakan Prinsip <i>Paperless</i></p>	<p>Bidang Pengembangan Pegawai/ an Sub Bidang Jabatan Fungsional</p>
			2. Pelantikan Pejabat Fungsional	<p>Terlaksananya kegiatan pelantikan dan pengambilan Jabatan Fungsional kepada seluruh Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.</p>				<p><b>Manfaat:</b></p> <p>Mendukung profesionalisme, mewujudkan ASN Pejabat Fungsional yang memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional di bidang sosial kultural serta melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.</p>	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RESTRANSRA	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>✓ Konsultasi, Koordinasi dan Klafifikasi Masalah Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian pada Instansi pembina (BKN dan KemenPAN-RB) (April)</p>	<p>✓ Konsultasi dan koordinasi permasalahan jabatan fungsional di Kanreg X BKN Denpasar (Mei, Juni, September)</p> <p>✓ Konsultasi dan koordinasi pengadmitrasian jabatan fungsional setelah inpassing (BKN dan KemenPAN-RB) (Mei, Juni)</p> <p>✓ Konsultasi, Koordinasi dan Klafifikasi Masalah Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian pada Instansi pembina (BKN dan KemenPAN-RB) (April)</p> <p>✓ Melaksanakan kegiatan BIMTEK KTI bagi para pejabat fungsional bidang</p>	-	<p>Dampak: Melantik dan mengangkat sumpah Jabatan Fungsional bagi 9.097 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, yang secara bertahap akan dilaksanakan pelantikan dan sumpah janji untuk 1.750 orang dan mendapat Surat Keputusan Gubernur NTT.</p>	<p>Bidang Pengembangan Pegawai/ Sub Jabatan Fungsional Tertentu</p>	
	<p>Terlaksananya kegiatan bimtek karya tulis ilmiah bagi pejabat fungsional Analisis Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur lingkup Pemprov.</p>	100 %	3. Bimbingan Teknis Penyusunan Karya Ilmiah bagi para pejabat fungsional bidang kepegawaian lingkup Pemerintah Provinsi NTT	<p>✓ Konsultasi, Koordinasi dan Klafifikasi Masalah Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian pada Instansi pembina (BKN dan KemenPAN-RB) (April)</p>	<p>✓ Konsultasi dan koordinasi permasalahan jabatan fungsional di Kanreg X BKN Denpasar (Mei, Juni, September)</p> <p>✓ Konsultasi dan koordinasi pengadmitrasian jabatan fungsional setelah inpassing (BKN dan KemenPAN-RB) (Mei, Juni)</p> <p>✓ Konsultasi, Koordinasi dan Klafifikasi Masalah Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian pada Instansi pembina (BKN dan KemenPAN-RB) (April)</p> <p>✓ Melaksanakan kegiatan BIMTEK KTI bagi para pejabat fungsional bidang</p>	-	<p>Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya penyelesaian permasalahan dalam Jabatan Fungsional dengan instansi terkait baik berupa penyelesaian Inpassing/Penyesuaian, Penilaian Angka Kredit maupun Permasalahan</li> </ul>	<p>Bidang Pengembangan Pegawai/ Sub Jabatan Fungsional Tertentu</p>	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RE NSTRA	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					kepegawaian lingkup Provinsi NTT (Agustus) <input checked="" type="checkbox"/> Konsultasi, Koordinasi dan klarifikasi masalah jabatan fungsional bidang kesehatan pada instansi pembina (Kemenkes dan KemenPAN-RB) (Mei, Juli, September)			administrasi jabatan fungsional lainnya. • Setelah mengikuti bimtek ini para pejabat fungsional yang mengikuti kegiatan ini diharapkan bisa membuat karya tulis ilmiah yang menjawab polemik seputar pekerjaan yang digelar dan berkontribusi bagi pelaksanaan tugas intansi juga bermanfaat bagi ASN itu sendiri dalam proses kenaikan pangkat jabatan dan dikemudian hari tidak mengalami kendala.	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RP/JMD/RE NSTRA	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								<p>Dampak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terelesaikannya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jabatan fungsional tertentu.</li> <li>• 50 orang pejabat fungsional analis kepegawaian dan assessor SDM aparatur lingkup Pemerintah Provinsi NTT mampu membuat Karya Tulis Ilmiah.</li> </ul>	
	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Grand Design Perhitungan kebutuhan dan pengembangan JFT	100 %	1. Penyusunan Grand Design Perhitungan Kebutuhan dan Pengembangan JFT	<p>✓ Pendataan Ulang Pejabat Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui SITA-JAFUNG (Januari-Februari)</p>	<p>✓ BIMTEK Penyusunan Grand Design Perhitungan Kebutuhan dan Pengembangan JFT (April) Desk Penyusunan Grand Design</p>	<p>✓ Seminar Hasil dan Penetapan Penyusunan Grand Design Perhitungan Kebutuhan dan Pengembangan JFT (Juli)</p>		<p>Manfaat:</p> <p>Merumuskan Grand Design Penyusunan dan Pengembangan Jabatan fungsional Tertentu lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk mengoptimalkan peran</p>	<p>Bidang Pengembangan Pegawai/Sub Bidang Jabatan Fungsional</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RP/JMD/RE NSTR	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	<p>✓ koordinasi dan konsultasi kegiatan rapat koordinasi</p> <p>Penyusunan Grand Design bagi Pengelola Kepegawaian Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di KEMENPAN-RB dan BKN (Februari-Maret)</p> <p>✓ Rakoor Penyusunan Grand Design bagi Pengelola Kepegawaian Lingkup Pemerintah (Maret)</p>	<p>6</p> <p>Perhitungan Kebutuhan dan Peng JFT (Mei)</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p> <p>Jabatan Fungsional dalam organisasi.</p> <p>Dampak : Semakin optimalnya peran Jabatan Fungsional sesuai dengan kedudukan dan perannya</p>	<p>10</p>
			<p>2. Uji Kompetensi</p>	<p>1. Uji Kompetensi bagi PNS pada Bangsal RSUD</p>	<p>1. Mendapatkan profile kompetensi manajerial PNS yang tepat untuk memenuhi kebutuhan RSUD</p>	<p>Bidang pengembangan Pegawai/ Sub Bidang Penilaian Kompetensi</p>			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RE NSTRA	TARGET	INDIKATOR KEGI/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3. Pengembangan Sistem Informasi Kompetensi Manajerial (SiKomja)			2. Memiliki profil potensi PNS RSUD yang digunakan untuk pengembangan karier PNS yang bersangkutan.	
								1. Memiliki database Kompetensi Manajerial ASN yang mengikuti Penilaian Kompetensi baik di lingkup pemerintah Provinsi NTT maupun Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Hasil pengolahan data yang tidak bersifat rahasia akan dipublikasikan di website Assessment Center yang merupakan produk dari rencana aksi tahun 2020	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RE NSTRA	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Melakukan coaching clinic aplikasi e-kinerja BKN bagi pengelola penilaian			3. Memiliki kompetensi manajerial ASN lingkup pemerintahan Provinsi NTT.	
			4. Penilaian Kinerja					1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola tentang operasional aplikasi e- Kinerja BKN 2. Mempersiapkan langkah-langkah implementasi e- kinerja di pemerintah provinsi NTT Tahun 2022	Bidang Pengembangan Pegawai/ Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kompetensi
3. Mutasi dan Pensiun Pegawai	Proses Usulan Kenaikan Pangkat PNS	100 %	Proses Usulan Kenaikan Pangkat			Mengadakan server e- kinerja (1 unit)		1. Mendukung penerapan aplikasi e- kinerja	
				❖ Melakukan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring; ❖ Pengumpulan berkas melalui google drive;	Mendistribusikan SK Kenaikan Pangkat Periode April 2021	❖ Melakukan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring; ❖ Pengumpulan berkas melalui google drive;	Mendistribusikan SK Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2021	SK Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober tepat waktu	Bidang Mutasi dan Pensiun/ Sub Bidang Kenaikan Pangkat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RP/JMD/RE NSTR	TARGET	INDIKATOR KEGI/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA			
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des					
1	2	3	4	❖ Mencetak SK Kenaikan Pangkat Periode April 2021	❖ Mencetak SK Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2021	❖ Mencetak SK Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2021	❖ Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring; ❖ Monitoring perkembangan aplikasi 'Lapor PNS Meninggal Dunia' Mencetak SK Pensiun Bulan Januari-Maret 2021	❖ Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring; ❖ Monitoring perkembangan aplikasi 'Lapor PNS Meninggal Dunia' Mencetak SK Pensiun Bulan April- Juni 2021	❖ Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring; ❖ Monitoring perkembangan aplikasi 'Lapor PNS Meninggal Dunia' Mencetak SK Pensiun Bulan Juli- September 2021	❖ Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi pelaksanaan tugas kegiatan melalui daring; ❖ Monitoring perkembangan aplikasi 'Lapor PNS Meninggal Dunia' Mencetak SK Pensiun Bulan Oktober Desember 2021	Tidak adanya keterlambatan Pensiun Pegawai	Bidang Mutasi dan Pensiun/ Sub Bidang Pemindahan dan Pensiun Pegawai
4. Disiplin dan KORPRI	Presentasi Kehadiran ASN Anggota	12 bulan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan	Dilaksanakan secara Live streaming melalui You Tube BKD Prov. NTT	Tetap akan dilaksanakan secara live streaming melalui You Tube BKD Prov. NTT	Tetap akan dilaksanakan secara live streaming melalui You Tube BKD Prov. NTT	1. Meningkatkan rasa solidaritas dan anggota KORPRI dalam mengikuti Pembinaan Rohani.	Bidang Disiplin dan KORPRI/ Sub Bidang KORPRI				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RP/JMD/RE NSTR	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2 KORPRI yang berpartisipasi dalam mengikuti Pembinaan Rohani Gabungan	3	4 Rohani Gabungan	5 pada bulan Januari	6	7	8	9 2. Meningkatkan rasa persaudaraan dan kerukunan diantara umat beragama	10
	1 Presentasi Kehadiran ASN Anggota KORPRI yang berpartisipasi dalam mengikuti HUT KORPRI	1 kegiatan	Terlaksananya Kemitraan Penyelenggaraan HUT KORPRI	-	-	-	Akan dilaksanakan pada bulan November 2021	Tenwujudnya organisasi KORPRI yang kuat dan untuk mempererat persatuan kesatuan, membangun rasa soliditas dan solidaritas sesama anggota KORPRI di lingkup Pemprov. NTT	Bidang Disiplin dan KORPRI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RP/JMD/RE NSTRA	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		100%	Tertaksananya Kegiatan Rekonsiliasi SSBP Taperum	-	Kegiatan Rekonsiliasi SSBP Taperum	-	-	Manfaat: Terekapnya data uang dari perumahan pengelola Provinsi, Kabupaten dan Kota se Prov.NTT.  Dampak: Dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh PNS aktif dan Pensiunan sebagai uang muka perumahan dan pengembalian Uang Perumahan PNS sesuai Golongan.	Subbidang Kesejahteraan Pegawai
		100%	Tertaksananya Proses Penyelesaian Administrasi CLTN	-	Proses Penyelesaian Administrasi CLTN	-	Proses Penyelesaian Administrasi CLTN	Manfaat: ASN dapat memanfaatkan hak Cuti CLTN sesuai aturan yang berlaku  Dampak: Masa kerja ASN yang bersangkutan akan dikurangi dari jumlah tahun pengambilan CLTN atau tidak dihitung sebagai masa kerja selama menjadi PNS.	Subbidang Kesejahteraan Pegawai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RE NSTRA	TARGET	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Terlaksananya Proses Penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU	Proses Penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU		Proses Penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU		Manfaat: ASN memiliki kartu istri dan Kartu suami Dampak: Sebagai satu syarat untuk pengusulan dan pengajuan serta pengambilan pensiunan di Kantor Taspen	Subbidang Kesejahteraan Pegawai
		100%	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Pembentukan Karakter melalui Camp Revolusi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Prov.NTT	Kegiatan Bimtek Pembentukan Karakter melalui Camp Revolusi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Prov.NTT	Kegiatan Bimtek Pembentukan Karakter melalui Camp Revolusi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Prov.NTT	Kegiatan Bimtek Pembentukan Karakter melalui Camp Revolusi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Prov.NTT	Kegiatan Bimtek Pembentukan Karakter melalui Camp Revolusi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Prov.NTT	Manfaat: ASN dibekali materi oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya sehingga dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada ASN dalam meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan. Dampak: - Terbentuknya karakter ASN sesuai nilai-nilai dan kode etik profesi; - Merubah mindset ASN dari level biasa ke level keunggulan; - Menciptakan pribadi ASN yang kreatif dan inovatif.	Subbidang Kesejahteraan Pegawai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RE STRA	TARGET	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4 Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan SLKS Bagi ASN Lingkup Pemerintah Prov.NTT  100%	5	6	7	8	9 Manfaat: ASN mendapatkan penghargaan dari Presiden RI karena rajin,tekun dan disiplin Dampak: Memotivasi orang lain untuk bertomba-tomba rajin,tekun dan disiplin untuk bisa mendapatkan penghargaan dari Presiden RI	10
	Terlaksanaan Pemeriksaan PNS bermasalah	20 PNS	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Melakukan Pemeriksaan Kasus PNS di Kab./Kota (PNS UPT dan Guru SMA/SMK) di 6 Kabupaten sesuai Temuan dan laporan yang diterima				Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan fakta-fakta tentang permasalahan PNS yang melakukan tindak indiscipliner, tindak pidana dan perceraian serta sudah sejauh mana proses yang sedang berjalan guna dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman/hukuman disiplin	Sub Bidang Disiplin Pegawai
		38 OPD		Melakukan pengambilan data rekapitulasi penjatuhan hukuman				Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan fakta-fakta yang dapat	Bidang Disiplin / Sub Bidang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RESTRANTRA	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				disiplin PNS tahun 2020 di perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTT				dipertanggungjawabkan tentang latar belakang terjadinya permasalahan PNS atau pelanggaran disiplin oleh PNS sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan	Disiplin Pegawai
		66 Kali		Melakukan kordinasi penyelesaian kasus PNS dengan Kepolisian, Kejaksaan , Pengadilan, Lapas dan Perangkat Daerah Terkait			-		Bidang Disiplin Korpri/ dan
	Tertaksanan ya Rapat Dewan Pertimbanga n Kepegawaia n	1 Kali	Evaluasi Disiplin ASN	-	-	Melakukan Pembahasan Kasus Kepegawaian melalui Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang diketuai oleh Sekretaris Daerah	-	agar dalam dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang bermasalah yang menjadi kewenangan Gubernur dapat dipertimbangkan hal-hal, baik itu yang dapat meringankan maupun yang memberatkan berdasarkan data-data dan informasi yang tersedia serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sub Bidang Disiplin Pegawai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA RPJMD/RE NSTRA	TARGET	INDIKATOR KEG/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				MANFAAT DAN DAMPAK	PELAKSANA
				T1 Jan-Mrt	T2 Apr-Jun	T3 Jul-Sep	T4 Okt-Des		
1	2 Terlaksanya Sidak Kehadiran PNS pada 21 Kab/Kota dan 38 OPD	3 21 kab./ Kota	4 Pembinaan Disiplin ASN	5 Melakukan Inspeksi Mendadak/ Sidak Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas lingkup Pemerintah Provinsi NTT di 21 Kab./Kota	6 -	7 -	8 -	9 Agar dapat diketahuinya tingkat kehadiran PNS pada tepat waktu dan penertiban dalam penggunaan finger print sebagai alat kontrol kehadiran PNS	10 Sub Bidang Disiplin Pegawai
		3 Kali		Melakukan Inspeksi Mendadak/ Sidak Kehadiran PNS pada 38 Perangkat Daerah di Kota Kupang					Sub Bidang Disiplin Pegawai

Jumat, 5 Februari 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



**HENDERINA S. LAISKODAT, SP. M. SI**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 197107071997032008**

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BKD PROVINSI NTT DI TAHUN 2021**

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Henderina S. Laiskodat, SP. M. Si menerima penghargaan BKN Award Peringkat II Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian pada saat peresmian Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN di Kupang pada hari Selasa, 16 November 2021.



2. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja seluruh ASN di Lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, maka dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis agar setiap ASN minimalnya mendapatkan 20 JP setiap tahun sesuai regulasi yang berlaku. Salah satu kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di tahun 2021 adalah Bimtek Keterbukaan Informasi Publik; terlihat para ASN sangat antusias berfoto bersama Narasumber dan Kepala BKD Provinsi NTT.



3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pimpinan yang bertanggungjawab dalam berbagai proses penyelenggaraan Kegiatan Assessment Center di Lingkup Provinsi Nusa Tenggara, turut mengikuti kegiatan pengawasan pada saat penyelenggaraan kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang. Nampak dalam gambar Ketua panel beserta anggota, Pengawas, Administrator, para Asesor dan Petugas Minlap beserta seluruh peserta selaku Asesse sedang mengikuti kegiatan pembukaan bertempat di Oelamasi Kabupaten Kupang.



4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara virtual. Terlihat dalam gambar, Ibu Kepala BKD sedang melakukan focus discussion Group (FDG) hasil penilaian kompetensi ASN Pelaksana, JFT, dan Pengawas di Lingkup Setda Provinsi NTT dengan Administrator dan para Asesor. Segala upaya harus dilakukan untuk tetap memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebab hal ini juga yang mendukung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun Provinsi NTT Tahun 2021.



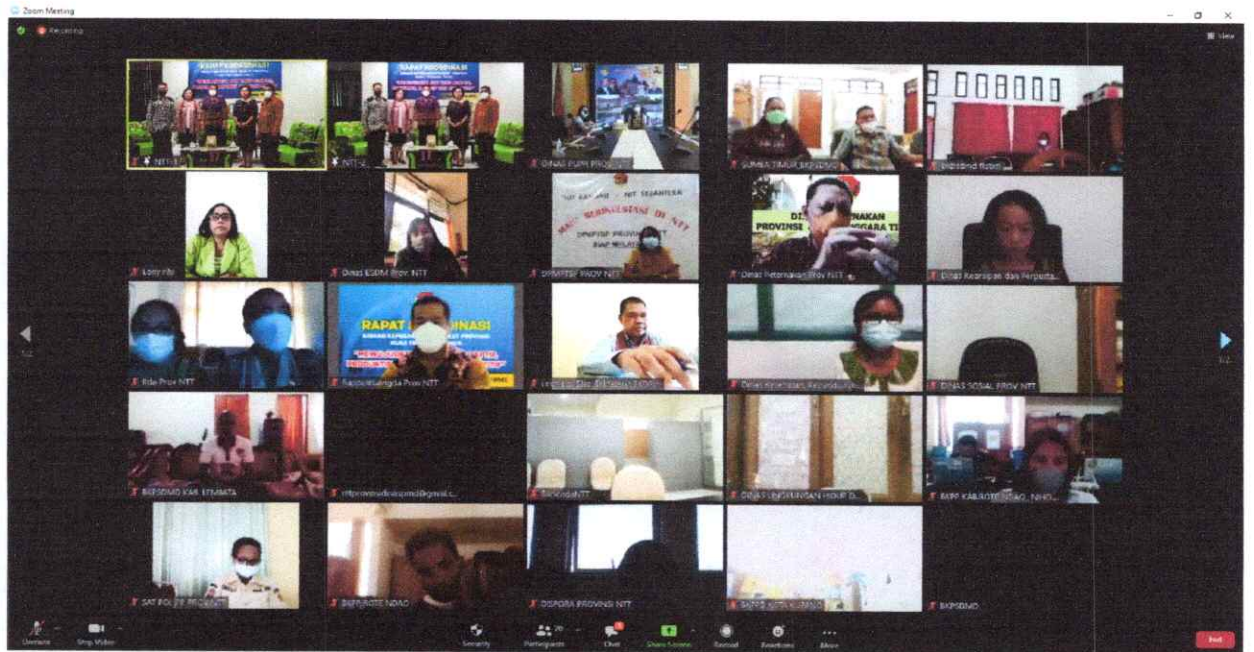
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti PKN II Angkatan XVII di BPSDMD Jengah . Nampak Ibu sedang menerima materi pra Pra seminar RPP di Kelompok B2, Sabtu 7 Agustus 2021.



6. Salah satu Analis Layanan Umum menerima Guru Pembimbing PKL beserta siswa-siswi SMKN I Kupang yang melakukan magang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT mulai tanggal 1 Juli 2021 s.d 30 November 2021.









LAMPIRAN FOTO SERTIFIKAT PENGHARGAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI NTT TAHUN 2021



**ALAMAT WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

---

1. Website : <https://bkd.nttprov.go.id/>
2. Facebook : <https://facebook.com/BkdProvNtt>
3. Instagram : <http://www.instagram.com/bkdprovinsintt>
4. Twitter : <http://twitter.com/Bkdprovinsintt>
5. Youtube : <https://www.youtube.com/c/BadanKepegawaianDaerahProvinsiNTT>